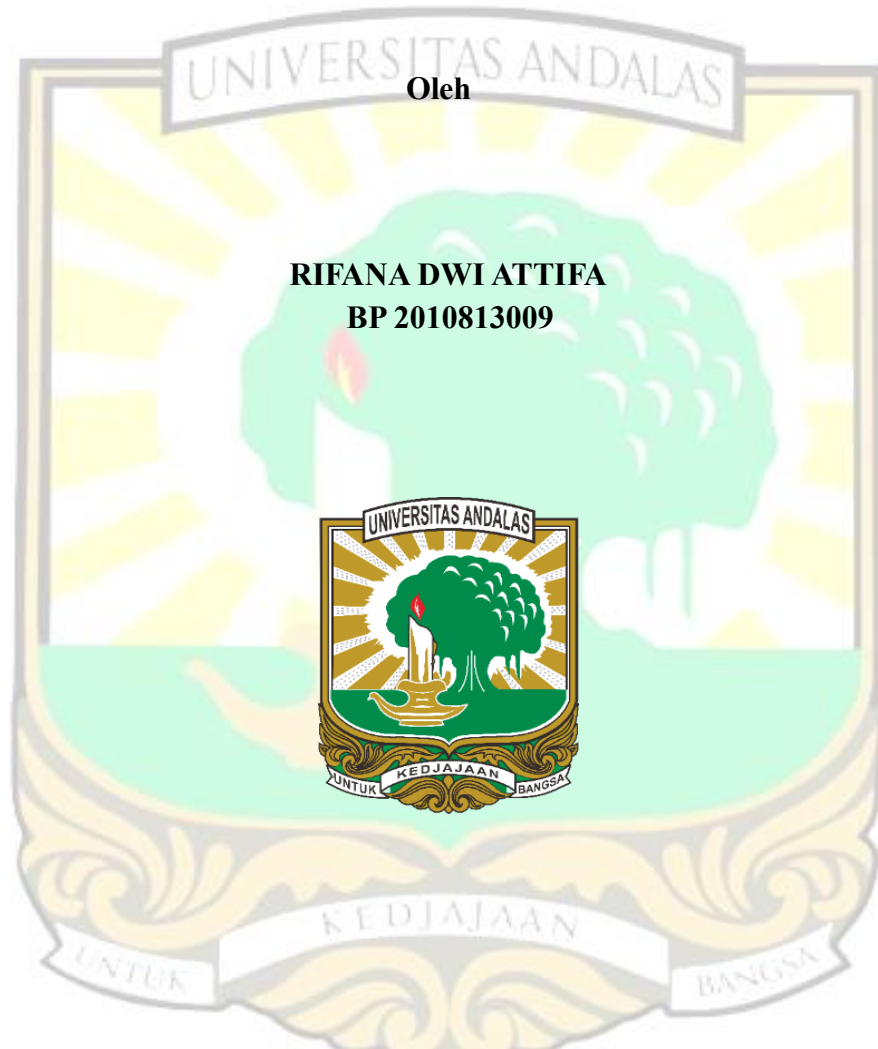


**UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG MERELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PANTAI PURUS PADANG**

SKRIPSI



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2024**

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG MERELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI PANTAI PURUS PADANG**

SKRIPSI

**Tugas untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Sosial
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Andalas**

Oleh

**RIFANA DWI ATTIFA
BP 2010813009**

Pembimbing

- 1. Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si**
- 2. Dr. Bob Alfiandi, M.Si**



**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2024**

RIFANA DWI ATTIFA, 2010813009. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Upaya Pemerintah Kota Padang Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Padang. Pembimbing 1 Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si, Pembimbing II Dr. Bob Alfiandi, M.Si.

ABSTRAK

Relokasi merupakan proses penataan ulang yang terjadi karena adanya tindakan dari pemerintah dalam upaya penempatan kembali kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap lebih tepat berdasarkan alasan dan tujuan tertentu. Akan tetapi, pada praktiknya relokasi memiliki berbagai hambatan. Selain penolakan dari PKL, hambatan relokasi PKL dapat terjadi ketika koordinasi antarinstansi dalam melaksanakan suatu kebijakan relokasi tidak dilakukan secara efisien dan efektif.

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tahapan-tahapan Pemerintah Kota Padang Merelokasi PKL di Pantai Purus Padang dan mendeskripsikan hambatan Pemerintah Kota Padang Merelokasi PKL di Pantai Purus Padang. Penelitian ini menggunakan Teori Birokrasi Max Weber. Pendekatan pada penelitian yang digunakan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan bahwa Pemerintah Kota Padang dalam merelokasi PKL di Pantai Purus Padang memiliki berbagai tahapan relokasi. Tahapan-tahapan ini meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan perencanaan, pada tahap ini pemerintah mengadakan pertemuan, pengeluaran surat permintaan dukungan personil serta Surat Perintah Tugas (SPT), dan pembentukan tim gabungan penertiban. Tahapan pelaksanaan, pemerintah atau otoritas terkait menjalankan pelaksanaan relokasi yang terdiri dari diseminasi, pemberian surat peringatan, penertiban, pendataan, dan penyediaan fasilitas. Kemudian, pada tahapan pengawasan Dinas Pariwisata meminta dukungan personil pengawasan kepada masing-masing instansi untuk membantu memastikan bahwa kebijakan relokasi dipatuhi PKL. Kemudian, tim dibentuk untuk melakukan pengawasan di Pos Pengamanan Pantai Purus. Selanjutnya, tim pengawasan melaksanakan patroli bersama di sekitar lokasi PKL untuk memantau aktivitas PKL. Hambatan Pemerintah merelokasi PKL, yakni pada tahapan perencanaan terdapat perbedaan pendapat dan keterbatasan anggaran, pada tahapan pelaksanaan terdapat perbedaan kepentingan serta keterbatasan lokasi dan fasilitas. Kemudian, pada tahapan pengawasan terdapat keterbatasan personil pengawasan dan penegakan aturan yang tidak jelas.

Kata Kunci: Upaya, Pemerintah Daerah, Relokasi, Pedagang Kaki Lima (PKL)

RIFANA DWI ATTIFA, 2010813009. Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University Padang. Thesis Title: Padang City Government's Efforts to Relocate Street Vendors (PKL) at Purus Beach Padang. Supervisor I Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si, Supervisor II Dr. Bob Alfiandi, M.Si.

ABSTRACT

Relocation is a rearrangement process that occurs due to government action in an effort to re-locate Street Vendors activities from one place to another that is considered more appropriate based on certain reasons and objectives. However, in practice, relocation has various obstacles. In addition to rejection from street vendors, obstacles to Street Vendors relocation can occur when coordination between agencies in implementing a relocation policy is not carried out efficiently and effectively.

The specific objectives of this research are to identify the stages of the Padang City Government Relocating Street Vendors at Purus Beach Padang and describe the obstacles of the Padang City Government Relocating Street Vendors at Purus Beach Padang. This research uses Max Weber's Bureaucracy Theory. The research approach used to obtain data in this study is a qualitative method with descriptive type. Selection of informants using purposive sampling technique and in collecting data using observation techniques and in-depth interviews.

Based on the results of this study, it was found that the Padang City Government in relocating street vendors in Purus Beach Padang has various stages of relocation. These stages include the planning, implementation, and supervision stages. In the planning stage, the government holds a meeting, issues a letter requesting personnel support as well as a Task Order, and forms a joint team. At the implementation stage, the government or relevant authorities carry out the relocation implementation which consists of dissemination, giving warning letters, curbing, data collection, and providing facilities. Then, at the supervision stage, the Tourism Office requests the support of supervisory personnel to each agency to help ensure that the relocation policy is complied with by Street Vendors. Then, a team was formed to conduct surveillance at the Purus Beach Security Post. Furthermore, the supervision team conducts joint patrols around the Street Vendors location to monitor Street Vendors activities. The government's obstacles in relocating street vendors are: in the planning stage, there are differences of opinion and budget constraints; in the implementation stage, there are differences of interest as well as limited locations and facilities. Then, at the supervision stage there are limited supervisory personnel and unclear rule enforcement.

Keywords: Efforts, Local Government, Relocation, Street Vendors (PKL)